

**PENGELOLAAN DANA BOS (BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH) PADA SMP
NEGERI 9 SATU ATAP SENDANA KABUPATEN MAJENE**

***THE MANAGEMENT OF BOS FUNDS (SCHOOL OPERATING COST) AT SMP
NEGERI 9 SATU ATAP SENDANA, MAJENE REGENCY***

Nuralisa

¹Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM
Gunung Sari Baru, Makassar – 90222
Email: nuralisaanwar@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui gambaran Perencanaan dana BOS pada SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana yang meliputi: (a) Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). (2) Untuk mengetahui gambaran penggunaan dana BOS sekolah pada SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana. (3) Untuk mengetahui gambaran pelaporan dana BOS pada SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana. Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS di SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana telah dilakukan cukup baik sesuai dengan mekanisme penyusunan RKAS, namun perlu di perhatikan dalam hal kesahihannya.

Penggunaan dana BOS pada SMP negeri 9 satap Sendana tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang baik, pemanfaatan dana yang cukup maksimal namun belum teratur dan proporsional.

Pelaporan dilaksanakan berdasarkan mekanisme pembuatan LPJ dana BOS. Namun ada beberapa pembukuan yang tidak sinkron penghitungan jumlah dana antara pembukuan satu dengan pembukuan lainnya. Pengelolah dana BOS belum handal dalam pembukuan dana tdan belum memahami komponen – komponen penggunaan dana dengan uraian kegiatan yang direncanakan serta komponen standar pengembangan berdasarkan SNP.

Kata kunci : Kata Kunci : Pengelolaan Dana BOS,

Abstract

The purpose of this study is to find out: (1) To find out the picture of planning of BOS funds at SMP Negeri 9 Satap Sendana which includes: . (2) To find out the picture of realization of BOS funds at SMP Negeri 9 Satap Sendana. (3) To find out of the picture of reporting the BOS funds at SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana This type of research is a descriptive case study. The results showed that the planning of BOS funds had been done quite well in the 9th State Junior High School and had already appropriate with the guide of RKAS codified. But the tim must concern to the valid of document. The use of BOS funds at SMPN 9 Satu Atap Sendana has been carried out in accordance with good financial management mechanisms, utilizing funds that are quite maximal but irregular and not proporsional. Reporting is carried out based on the mechanism for making LPJ BOS funds. The planning component in RKAS is not in accordance with the activity accountability

component in LPJ. Lack of understanding of the components of the use of funds with a description of planned activities and components standards based on the SNP.

Keywords: Management of BOS funds.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar yaitu di SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Oleh karena itu sejak tahun 2005, salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat anggaran alokasi cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya bagian untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendaanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi dan pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Besaran dana BOS setiap sekolah di dasarkan pada jumlah siswa, jadi semakin banyak siswa maka akan semakin banyak dana BOS pada sekolah tersebut. Sehingga sekolah yang memiliki siswa yang banyak sangat memungkinkan untuk memenuhi komponen – komponen penggunaan dana BOS yang bermuara pada pemenuhan SPM dan SNP.

Sekolah Satap yang rata-rata memiliki siswa yang sedikit maka dana yang diperolehpun sedikit. Dan lokasi sekolah yang terletak jauh dari kota kecamatan dan kabupaten yang tentunya membutuhkan biaya yang besar untuk mengikuti kegiatan tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Belum lagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak cukup, sarana dan prasarana yang sangat kurang, membuat sekolah satap harus kreatif dalam mengelola dana yang sedikit supaya efisien dan efektif.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019, Kementerian mempunyai kebijakan khusus terkait perhitungan alokasi BOS Reguler bagi: (a. Sekolah Terintegrasi, SMP satu atap, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan (b. SD atau SMP yang memenuhi ketentuan khusus . Untuk Sekolah yang diselenggarakan khusus oleh masyarakat, telah memiliki izin operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik. dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik, yaitu memberikan alokasi BOS Reguler minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (*fix cost*) dari biaya operasi Sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik saja.

Salah satu sekolah satap yang ada di kabupaten Majene adalah SMPN 9 Satap Sendana. Sekolah ini di nahkodai ibu Dra. Nuraidah, dan terletak di dusun Pumballar kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana. SMPN 9 Statap Sendana memiliki 4 guru PNS, 7 guru honorer dan 4 orang pegawai honor. Jumlah siswa dari kelas VII – IX sebanyak 20 orang. Dengan jumlah siswa yang kurang dari 60 orang berarti sekolah SMPN 9 Satap Sendana dapat menikmati kebijakan khusus dari kementerian pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2019.

Oleh karena itu, dari uraian permasalahan di atas peneliti tertarik membahas bagaimana Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Satu Atap khususnya pada SMP negeri 9 Satu Atap Sendana kabupaten Majene”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan alasan agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti dalam hal ini efektifitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 9 Satap Sendana. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala sosial.

Pelaksanaan penelitian deskriptif kualitatif ini difokuskan pada pengelolaan dana BOS pada SMP negeri Satap meliputi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan.

Untuk mengumpulkan data diperlukan instrument, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokument

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah instrumen dan pengkajian dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana, sebagai data awal pada tahun 2019 sekolah ini memiliki siswa sebanyak 22 orang, guru PNS 4 orang, GTT sebanyak 7 orang dan PTT sebanyak 3 orang. Jumlah dana BOS reguler yang diterima dalam tahun sebanyak Rp 60.000.000,- Meskipun penetapan alokasi dana BOS berdasar pada jumlah siswa dikali Rp 1000.000,- untuk jenjang SMP, namun kementerian pendidikan memiliki kebijakan khusus bagi SMP satu atap yang memiliki peserta didik kurang dari 60 orang, tetap mengalokasikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Ini jelas tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2019.

Penyusunan RKAS yang dilakukan dalam rapat perencanaan anggaran sekolah dilaksanakan Pada SMP Negeri 9 Satu Atap Sendana pada tanggal 2 Januari 2018. Hasil wawancara dengan beberapa informan kunci, diperoleh data bahwa sekolah selalu melaksanakan rapat kerja dan menyusun RKAS yang membahas tentang bagaimana menjalankan manajemen sekolah untuk satu tahun kedepan, yang didalamnya termasuk penggunaan anggaran. RKAS disusun berdasarkan pada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan rekomendasi yang dihasilkan pada EDS. Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh elemen sekolah.

Jumlah dana yang direncanakan pada RKAS tahun 2019 adalah saldo kas tahun 2018 sebanyak Rp 7.012.500,- saldo bank tahun 2018 Rp 50.245 dan pendapatan BOS tahun 2019 sebesar Rp 60.000.000,- Total dana dalam RKAS sebanyak Rp 67.062.745,-. Namun jumlah saldo bank dan kas tunai tahun 2018 berbeda dengan jumlah yang tertera pada BKU bulan Januari. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa ada kesalahan dalam menentukan besaran saldo tahun 2018. Dalam dokumen RKAS yang peneliti telaah, saldo kas tahun 2018 sebanyak Rp 7.012.500,- ternyata dianggarkan untuk belanja kegiatan ekstrakurikuler sebanyak Rp 2.836.000,- setelah di konfirmasi ini merupakan utang kegiatan tahun 2018 yang belum terbayarkan, belanja ATK dan peralatan kebersihan sebanyak Rp 176.500,-, dan belanja modal pengadaan rangka tenda sebanyak Rp 4.000.000,-.

Berdasarkan data penggunaan dana BOS SMPN 9 Satu Atap Sendana berdasarkan komponen penggunaan dana sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang juknis penggunaan dana BOS dapat dilihat dari tabel hasil penelitian selama tahun 2019 yang penggunaan dananya terbagi dalam 4 triwulan. Peneliti kemudian menganalisis komponen - komponen tersebut dalam persentase sebagai berikut ; 1) *Komponen pengembangan perpustakaan* sebanyak Rp 6.320.000,- atau berkisar 10,53%. Angka ini bisa saja ditingkatkan mengingat maksimal perbelanjaan untuk pengembangan perpustakaan atau belanja buku sebanyak 20%. 2) *PPDB (penerimaan peserta didik baru)*. Belanja pada komponen ini sebanyak Rp 0,-. Hal ini sebenarnya tidak masuk di akal dimana pada bulan

Julia atau triwulan III program penerimaan peserta didik baru merupakan hal yang wajib. Ternyata setelah dikonfirmasi melalui telpon oleh kepala sekolah SMPN 9 Satu Atap Sendana memberikan jawaban bahwa kegiatan PPDB di SMPN 9 satu atap Sendana tetap berjalan namun tidak menggunakan dana karena pendaptar siswa baru itu di bawah 10 orang dan hanya 1 SD sebagai sekolah penunjang, sehingga penggunaan dana tidak terlalu dibutuhkan, adapun penggandaan formulir dan ATK yang digunakan itu tergabung dalam belanja ATK administrasi kantor. 3) *Kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler* sebesar Rp 6.086.000,- atau berkisar 10,14%., kegiatan ini hanya dilaksanakan pada triwulan I dan triwulan IV dan kegiatan yang bersifat kegiatan ekstrakurikuler. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa komponen kegiatan pembelajaran yang bersifat akademik tidak diakomodir. 4) *Kegiatan Evaluasi Pembelajaran* sebanyak Rp 6.545.000,- atau berkisar 10,91%. Kegiatan pada komponen ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan memiliki jadwal yang tetap dari dinas pendidikan kabupaten. 5) *Pengelolaan Sekolah* sebanyak Rp. 13.031.500,- atau berkisar 21,72%. Jumlah ini cukup mewakili kegiatan atau perbelanjaan dalam setiap triwulan. 6) *Pengembangan Keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan sekolah* sebanyak Rp 2.300.000,- atau berkisar 3,83%. Jumlah ini sangat sedikit untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Dan berdasarkan uraian kegiatan pada BKU, tercantum kegiatan MKKS/MGMP dan setelah dikaji lebih mendalam dalam kuitansi pembayaran ternyata ini hanya berfokus pada pengembangan kepala sekolah atau kegiatan MKKS. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini tidak mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 7) *Langganan Daya dan Jasa* sebanyak Rp 800.000,- atau berkisar 1,33% angka ini sangat sedikit dan ini hanya digunakan untuk beli pulsa internet, setelah dikonfirmasi tentang belanja pemakaian listrik, hal ini dialokasikan dalam belanja rutin daerah. 8) *Pemeliharaan sarana dan prasarana* sebesar Rp 9.850.000,-. Atau berkisar 16,42%. Belanja pada komponen sudah sangat sesuai dengan kebutuhan sekolah 9) *Pembayaran Honor* sebanyak Rp 6.660.000,- atau berkisar 11,1%. Jumlah ini masih bisa ditingkatkan dimana juknis penggunaan dana BOS memberi peluang sebanyak 15 %. Dari data BKU tercatat pembayaran honor GTT namun yang tertera di kuitansi yang terbayarkan adalah honor PTT sebanyak 3 orang dengan perhitungan 185.000/bulan/orang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa besaran honor untuk PTT tersebut sangat sedikit dan perlu di maksimalkan mengingat medan untuk menempuh sekolah ini cukup sulit. Honor sebanyak ini tidak cukup buat transport ke sekolah. 10) *Pembelian atau perawatan alat multi media pembelajaran* sebanyak Rp 15.450.000,- atau berkisar 25,75 %.

4. KESIMPULAN

Dari berbagai data yang diperoleh dalam penelitian tentang pengelolaan dana BOS SMP negeri 9 satap Sendana tahun 2019, dengan studi kasus pada SMP negeri 9 satap Sendana tahun 2019, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Perencanaan dana BOS telah dilakukan dengan cukup baik pada SMP negeri 9 satap Sendana. Sesuai dengan mekanisme penyusunan RKAS, namun perlu di perhatikan dalam hal kesahihannya terutama dalam hal pemberian cap stempel. 2) Penggunaan dana BOS pada SMP negeri 9 satap Sendana tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang baik, pemanfaatan dana yang cukup maksimal namun belum teratur dan proporsional. Pelaporan 3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme pembuatan LPJ dana BOS. Namun ada beberapa pembukuan yang tidak sinkron penghitungan jumlah dana antara pembukuan satu dengan pembukuan lainnya. Pengelolah dana BOS belum handal dalam pembukuan dana dan belum memahami komponen – komponen penggunaan dana dengan uraian kegiatan yang direncanakan serta komponen standar pengembangan berdasarkan SNP.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian penelitian ini sepenuhnya tidak terlepas dari tekad, kesabaran, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. H. Ansar, M.Si., selaku pembimbing I dan ibu Dr. Wahira, M.Pd., selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dan menuntun penulis dari awal penelitian hingga tahap penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Anshari, M.Hum., Prof. Dr. Ismail Tolla, M.Pd., dan Dr. Sulaiman Samad, M.Si., selaku penguji yang telah memberikan kritikan, masukan, dan saran demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Tidak lupa Bapak/Ibu guru dan staf di SMPN 9 Satu Atap Sendana atas segala bantuan selama peneliti melaksanakan penelitian. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

6. REFERENSI

- Indrawati, Ph. D. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Reflika
- Makmur. (2010). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung. Relfika
- PerMendikBud Nomor 3 Tahun 2019. (2019). Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Reguler . Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- PerMendikBud Nomor 35 Tahun 2019. (2019). Perubahan Kedua atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Reguler . kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Melati Tiwik, (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Papringan 02 Kaliwungu Semarang. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indawati Erna, Mulyati, dan Miftakodin . (2019). Pengelolaan Keuangan Sekolah. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wahyudi, Yeni Bagus. (2013). Efektivitas Pengelolaan Dana BOS diSDN 1 danSMPN 2 Kabupaten Jombang. Universitas Muhammadiyah Malang
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2003 (2003). Sistem Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Bakri. (2013). Pengelolaan Dana BOS pada SMPN 1 Tellu Siattinge Kecamatan Siattinge Kabupaten Bone. Universitas Negeri Makassar
- Permendikbud, Nomor 51 tahun 2019. (2011). Petunjuk Penggunaan Dana Bos dan Laporan Keuangan tahun 2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Permendikbud, Nomor 1 tahun 2018. (2018). Petunjuk Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Moloeng, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Sutopo,H.B 2012. Metodologi Pendidikan Kualitatif. Surakarta. UNS Press.